



PEMBAYARAN UANG JAMINAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IUU FISHING DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI TERHADAP KASUS VOLGA, PROMPT RELEASE)

Kevin Vilio Parasian*, L. Tri Setyawanto, Nanik Trihastuti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : kevinvilio20@gmail.com

ABSTRAK

Penangkapan ikan ilegal adalah masalah yang telah menjadi perhatian penting bagi banyak negara karena berdampak besar terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi negara pantai. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah kasus Volga yang terjadi antara Rusia dan Australia. Permasalahan yang di bahas dalam penulisan ini adalah Apakah tindakan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal Volga yang berbendera Rusia di wilayah ZEE Australia melanggar ketentuan-ketentuan mengenai *IUU Fishing* dalam Hukum internasional dan Bagaimana upaya penyelesaian sengketa melalui pembayaran uang jaminan berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindakan *IUU Fishing* yang dilakukan oleh Rusia di dalam wilayah ZEE Australia menurut UNCLOS 1982. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari sumber-sumber hukum yang antara lain adalah prinsip hak berdaulat di wilayah ZEE dari negara pantai dan prinsip pelepasan segera dengan uang jaminan yang layak. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, penangkapan ikan yang dilakukan Kapal Volga yang berbendera Rusia di ZEE Australia adalah tindakan *IUU Fishing* dan penyelesaian sengketannya melalui pembayaran uang jaminan terkait pelepasan segera (Prompt Release). Penentuan jumlah uang jaminan yang tidak diatur dalam UNCLOS membuat penentuan jumlah dari uang jaminan tersebut menjadi sengketa diantara Rusia dan Australia dan akhirnya diselesaikan di ITLOS.

Kata Kunci: *IUU Fishing*, *Prompt Release*, Pembayaran Uang Jaminan.

Abstract

IUU Fishing is an issue that have become an important concern for many countries, due to serious impact to the environmental, social and economic aspect of the coastal state. One of the cases that attract attention is the the Volga case between Russia and Australia. The issues of this thesis are, first, is the act of fishing done by Volga Russian –flagged vessel at Australian EEZ in violation of the provisions regarding IUU fishing in international law and the second is How to efforts to resolve the dispute through payment of bail relating to enforcement legal action against IUU fishing conducted by Russia in the Australian EEZ under UNCLOS in 1982. This study used normative juridical approach. The data used in this research is secondary data that gathered from some regulations which include the principle of sovereign rights in the EEZ of a coastal state and the prompt release principle accompanied by reasonable bond. The conclution of this study is, the fishing that was done by Volga the Russian-Flagged vessel EEZ Australia is an act of IUU Fishing and the dispute settled through the bail payment regarding to Prompt Release and Reasonable Bond. Determination of the amount of the Reasonable Bond which is not provided in UNCLOS for the determination of the amount of money has become a dispute between Russia and Australia, and finally settled at ITLOS.

Keywords: *IUU Fishing*, *Prompt Release*, *Reasonable Bond*.

I. PENDAHULUAN

Perikanan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan suatu negara, juga mempunyai peran dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Saat ini kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap ketahanan pangan nasional cukup besar, bahkan potensi produk perikanan di kawasan Samudra Pasifik akan menjadi alternatif ketahanan pangan dunia.

Sebagaimana laporan dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) dinyatakan produk perikanan merupakan sumber protein hewani yang universal, tidak menimbulkan penyakit, mencerdaskan dan menyehatkan. Bahkan sejak tahun 2011 untuk pertama kalinya produksi perikanan budidaya dunia, telah melampaui produksi daging sapi.¹

Keinginan untuk menggunakan lebih atau menguasai laut beserta sumber daya hayati dan non hayati oleh berbagai negara inilah yang akhirnya mendorong negara-negara lain untuk menyusun aturan untuk mengeksplorasi wilayah laut tersebut yang dirumuskan dalam Konvensi Hukum Laut 1982, meskipun masih terdapat pertentangan antar negara tentang hal ini.

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 diatur pembagian wilayah laut negara pantai, batasan-batasan penggunaan wilayah laut, serta wewenang dan kedaulatan negara

pantai di wilayah laut dan sebagainya.

Salah satu zona maritim yang tercakup dalam pengaturan Konvensi Hukum Laut 1982 adalah ZEE. Dalam ketentuan Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982 ditetapkan bahwa dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati dan non hayati dari perairan diatas dasar laut dan dari dasar laut serta tanah dibawahnya dan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi dan konservasi tersebut.

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982, ruang lingkup pengaturan hukum pengelolaan sumber daya alam khususnya di sektor perikanan, diatur dalam Bab V Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai hak-hak berdaulat negara pantai untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya ikan yang ada di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE). Berdasarkan ketentuan tersebut negara-negara tak berpantai yang secara geografis kurang beruntung tidak memiliki daerah dengan potensi kemartiman yang didahulukan untuk dapat turut memanfaatkan bagian dari surplus sumber daya ikan dari ZEE negara-negara pantai yang ada di kawasan yang sama.

Dalam hal ini, hak-hak berdaulat yang dimiliki oleh suatu negara pantai di zona ekonomi eksklusif bersifat residu karena hanya berlaku terhadap sumber daya hayati yang terkandung di dalam zona tersebut

¹ Gloria Samantha, Perikanan Sebagai Pilar Ketahanan Pangan Dunia, <http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/1/perikanan-sebagai-pilar-ketahanan-pangan-dunia> diakses tanggal 13 Mei 2016 Pukul 15:36

dan tidak meliputi perairan dan ruang udara di atasnya.²

Ada pun hak-hak negara lain yang dijamin oleh Pasal 58 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 adalah kebebasan untuk berlayar di zona ekonomi eksklusif, dan terbang di atasnya, serta memasang kabel, dan saluran-saluran pipa di bawah permukaan laut. Sehubungan dengan ketentuan ini, maka yang perlu dipersoalkan apakah kebebasan bagi kapal asing untuk melakukan kegiatan militer dan pengumpulan data dan intelijen di zona ekonomi eksklusif.

Seiring dengan tingginya permintaan komoditas perikanan dan kelautan, banyak negara yang mengoptimalkan teknologi dalam bidang perikanan agar dapat memenuhi permintaan tersebut. Tak sedikit oknum-oknum di bidang perikanan melakukan penangkapan yang tidak sesuai dengan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menangkap ikan secara ilegal.

Wacana tentang *Illegal fishing* muncul bersama-sama dalam kerangka *IUU Fishing Practices* pada saat diselenggarakannya forum CCAMLR (*Commision for Conservation of Atlantic Marine Living Resources*) pada 27 Oktober – 7 November 1997. IUU fishing dapat dikategorikan dalam tiga kelompok:³

² Dikdik Mohammad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), Hlm. 82.

³ Usdawadi Amir, *Journal Opinio Juris* PENEGAKAN HUKUM IUU FISHING MENURUT UNCLOS 1982 (STUDI KASUS: *VOLGA CASE*), Vol.12 Januari-April 2013, Hlm. 74.

1. *Illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki izin dari negara tersebut;

2. *Unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan

3. *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 73 UNCLOS 1982, jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan atas kapal tersebut dan memberitahu negara bendera kapal. Setelah ditangkap, kapal dan awak kapal tersebut harus segera dilepaskan dengan *reasonable bond* (uang jaminan yang layak) yang diberikan kepada negara pantai.⁴

Hukuman terhadap kapal asing tersebut juga tidak boleh dalam bentuk hukuman badan yaitu penjara. Dengan demikian bentuk hukuman bagi kapal dan awaknya berbeda jika terjadi di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan dengan di ZEE. Kewenangan negara pantai terhadap pelanggaran di ZEE terbatas hanya untuk menegakan hukum yang bertalian dengan perikanan.

Makna kedaulatan negara pantai di ZEE tidak sama dengan makna kedaulatan di daerah laut teritorial.

⁴ Usdawadi Amir, Op.cit. Hlm 76.

Di wilayah laut teritorial, negara pantai mempunyai kedaulatan penuh dan yurisdiksi negara berlaku disana, namun di wilayah ZEE, negara pantai tidak memiliki kedaulatan untuk menggunakan kedaulatan fungsionalnya jika terjadi permasalahan di wilayah tersebut karena di ZEE tidak berlaku kedaulatan negara pantai, namun negara pantai memiliki hak berdaulat atasnya. Terbatasnya kedaulatan inilah yang seringkali menjadi penyebab sengketa dan sulitnya penyelesaian sengketa yang terjadi di ZEE.

IUU Fishing sendiri belum dirumuskan di UNCLOS, namun beberapa negara telah menyusun masing-masing aturan mengenai itu seperti apa yang diatur dalam CCAMLR (*Commision for Conservation of Atlantic Marine Living Resources*) ataupun dalam IPOA-IUU (*International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate-Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*) yang disusun oleh FAO.

Dalam dua dekade dari tahun 1997 sampai 2016 terjadi cukup banyak kasus *IUU Fishing* di berbagai belahan dunia seperti kasus *Camuoco Case* yang terjadi antara Panama dan Perancis pada tahun awal 2000 ataupun kasus *Monte Confurco* antara Perancis dengan Seychelles pada akhir tahun 2000.

Salah satu kasus yang menarik perhatian dunia adalah kasus ditangkapnya kapal Volga yaitu sebuah kapal berbendera Rusia yang selanjutnya ditahan beserta anak buah kapalnya oleh otoritas Australia karena dituduh melakukan *IUU Fishing* di ZEE Australia pada

Februari 2002 dan menjalani proses pengadilan dimana pengadilan akhirnya memutuskan sejumlah uang jaminan yang harus dibayarkan di *The Supreme Court of Western Australia (Wheeler J)* memutuskan jumlah uang jaminan yang harus dibayarkan pihak pemilik kapal Volga.

Dalam putusannya, *The Supreme Court of Western Australia (Wheeler J)* menyatakan sebagai berikut :⁵

1. suatu jaminan mencakup nilai kapal, bahan bakar, pelumas dan peralatan penangkap ikan (AU\$ 1,920,000);

2. Jumlah (AU\$ 412.500) untuk mengamankan pembayaran denda potensial dikenakan dalam proses pidana yang masih tertunda terhadap awak kapal;

3. Jaminan (AU\$ 1.000.000) terkait dengan pelaksanaan operasional dari VMS dan tindakan pentaatan upaya konservasi oleh CCAMLR.

Pada Desember 2002, Rusia mengajukan gugatan terhadap Australia kepada Mahkamah Hukum Laut Internasional (*International Tribunal Law of the Sea*), berkaitan dengan desakan pembebasan atas kapal dan anak buah kapal yang ditahan, dan jumlah kompensasi yang wajar yang harus dibayarkan.

Kasus Volga adalah salah satu kasus di Mahkamah Internasional Hukum Laut (ITLOS) berkenaan dengan pelepasan segera (*Prompt Release*) kapal dan awaknya yang

⁵ *The Volga Case (Russian Federatian v Australia) Prompt Release (Written proceedings), Statement in Reponse of Australia*, 7 Desember 2002. Alinea 72. Dalam <http://www.itlos.org>. Disadur pada tanggal 19 September 2016 Pukul 15:35

ditahan oleh suatu negara. Dalam kasus Volga, penggugatnya adalah Federasi Rusia dan Australia sebagai tergugat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 292 UNCLOS 1982 Rusia memasukkan gugatan (permohonan) ke ITLOS yang meminta pelepasan kapal Volga dan tiga awaknya pada tanggal 2 Desember 2002. Setelah diajukannya gugatan terhadap Australia oleh Federasi Rusia, nantinya akan ada putusan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini oleh penulis dan dibahas lebih lanjut sesuai perumusan masalah yang telah disusun oleh penulis.

Dari latar belakang ini saya akan mengangkat dua permasalahan, yaitu:

1. Apakah tindakan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal Volga yang berbendera Rusia di wilayah ZEE Australia melanggar ketentuan-ketentuan mengenai IUU Fishing dalam Hukum internasional?

2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa melalui pembayaran uang jaminan berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindakan IUU Fishing yang dilakukan oleh Rusia di dalam wilayah ZEE Australia menurut UNCLOS 1982?

II. METODE

Metodologi merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Bisa juga diartikan sebagai ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan,

dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁶

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁷

Dalam penyusunan penulisan hukum ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁸, sedangkan pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan⁹

⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), Halaman 1.

⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Halaman 1.

⁸ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hlm. 20.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 13.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah telaah deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.¹⁰ Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Dalam penulisan hukum yang bersifat deskriptif analitis maka akan menggambarkan serta menentukan isi atau makna dari peraturan-peraturan internasional yang berlaku. Isi dari peraturan internasional tersebut kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini.

C. Sumber Data

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah penelitian yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan yaitu bersifat deskriptif, sehingga data yang dipergunakan adalah:

Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan berlaku sesuai dengan kasus yang diteliti penulis dalam bentuk; *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, The "Volga" Case (Russian*

Federation v. Australia), Prompt Release 2002, Australia The Fisheries Management Act 1991, International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing 2001

2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami juga membantu memberi petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer seperti, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah, Buku-buku ilmiah mengenai hukum internasional, perbatasan negara, *illegal, unreported, and unregulated fishing*, dan buku-buku lainnya yang terkait dengan penelitian ini, dan jurnal penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, kamus bahasa inggris

D. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komperhensif, dan lengkap. Analisis data artinya menguraikan data secara

¹⁰ Roni Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.*, Hlm. 35.

bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komperhensif artinya analisis dilakukan secara mendalam sesuai dengan lingkup penelitian dan berdasarkan pada bahan-bahan hukum dalam lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk analisis. Analisis data dan interpetasi seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum normatif yang sempurna.¹¹

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penangkapan Ikan yang Dilakukan Kapal Volga Rusia di Wilayah ZEE Australian dalam Perspektif Hukum Internasional

1. Posisi Kasus

Volga adalah kapal ikan yang mengibarkan bendera Federasi Rusia. Pemiliknya adalah *Olbers Co. Limited*, suatu perusahaan yang berkedudukan di Rusia dengan nakhoda *Alexander Vasilkov*, warga negara Russia. Pada 7 Februari 2002, *Volga* dinaiki oleh anggota militer Australia dari “*Australian military helicopter from the Royal Australian Navy frigate HMAS Canberra*”. Pada saat dinaiki, *Volga* berada pada posisi sekitar 51°35S, 78°47E, yang terletak di luar batas ZEE Australia di kawasan Pulau Heard dan McDonald. Pada yang sama,

nakhodanya ditahan oleh *HMAS Canberra*.¹²

Pada tanggal 19 Februari 2002, dilakukan penahanan dan *Volga* dikawal ke pelabuhan Fremantle, Australia Barat. Pada tanggal yang sama, nakhoda dan awaknya juga ditahan berdasarkan *the Fisheries Management Act 1991*. Pada 20 Februari 2002, disampaikan pemberitahuan penyitaan kepada nakhoda, terhadap kapal *Volga* (termasuk semua jaring, jebakan dan peralatan-peralatan serta hasil tangkapan). Pada 27 Februari 2002 dibuat laporan penilaian, yang disiapkan untuk tujuan jaminan bahwa *Volga* bernilai US\$ 1 juta, dan bahan bakar, pelumas serta peralatan bernilai AU\$ 147,460. Pada waktu ditangkap di atas *Volga* ditemukan hasil tangkapan sebanyak 131.422 ton ikan *patagonian toothfish (dissostichus eleginoides)* dan 21.494 ton umpan yang dilelang pada tanggal 20 Mei 2002 senilai AU\$ 1,932,579.28.¹³

Pada 6 Maret 2002, tiga anggota awak kapal (*the chief mate, the fishing master and the fishing pilot*), semua berkewarganegaraan Spanyol, dituntut telah menggunakan kapal ikan asing di Zona Perikanan Australia (AFZ) untuk tujuan komersial tanpa surat izin bagi kapal asing. Ketiganya, menerima untuk membayar uang jaminan masing-masing sejumlah AU\$ 75,000 tunai, menyerahkan semua paspor dan *seaman's papers*, dan tinggal di tempat yang ditetapkan oleh *the Supervising Fisheries Officer with the Australian Fisheries*

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm 127.

¹² Usmawadi Amir, Op.cit. Hlm 77

¹³ Usmawadi Amir, Op. Cit., Hlm 78.

Management Authority (AFMA). Pemilik *Volga* mendepositkan pembayaran sejumlah AU\$ 225,000 di pengadilan bagi ketiga anggota awak pada atau sekitar 23 Maret 2002.

Pada 30 Mei 2002, tiga anggota awak kapal mendapat berbagai variasi persyaratan uang jaminan yang memungkinkan mereka kembali ke Spanyol. Kemudian pada 14 Juni 2002, *the Supreme Court of Western Australia (Wheeler J)*, atas banding oleh *the Commonwealth Director of Public Prosecutions*, memutuskan jaminan bervariasi yang dikeluarkan pada 30 Mei 2002, supaya diwajibkan, sebagai pengganti AU\$ 75,000, yang ada dengan jumlah simpanan sebesar AU\$ 275,000.

Pada waktu tribunal (ITLOS) mulai memeriksa kasus ini, pada tanggal 16 Desember 2002, *the Full Court of the Supreme Court of Western Australia* telah menguatkan banding atas ketiga anggota awak *Volga* menurut keputusan *Wheeler J* (Hakim *Wheeler*). *The Full Court* memerintahkan bahwa tiga anggota awak diizinkan meninggalkan Australia dan kembali ke Spanyol, dimana masing-masing dikenakan uang jaminan yang harus mereka didepositkan secara tunai untuk: MANUEL PEREZ LIJO sebesar AU\$ 95,000.00 serta JOSE MANUEL LOJO EIROA dan JUAN MANUEL GONZALEZ FOLGAR masing-masing sebesar AU\$ 75,000.00.

Pemilik *Volga* mengajukan permohonan ke "*the Federal Court of Australia*" untuk menghentikan penyitaan kapal. Sebagai jawaban atas permintaan pemilik bagi

pelepasan kapal sambil menunggu tindakan hukum, Pejabat Australia menetapkan uang jaminan sejumlah AU\$ 3,320,500.00 untuk pelepasan *Volga*, yang terdiri dari:

1. suatu jaminan mencakup nilai kapal, bahan bakar, pelumas dan peralatan penangkap ikan (AU\$ 1,920,000);
2. Jumlah (AU\$ 412.500) untuk mengamankan pembayaran denda potensial dikenakan dalam proses pidana yang masih tertunda terhadap awak kapal;
3. Jaminan (AU\$ 1.000.000) terkait dengan pelaksanaan operasional dari VMS dan tindakan pentaatan upaya konservasi oleh CCAMLR.

Ketentuan pada Pasal 292 UNCLOS 1982 mengatur bahwa:

"Where the authorities of a State Party have detained a vessel flying the flag of another State Party and it is alleged that the detaining State has not complied with the provisions of this Convention for the prompt release of the vessel or its crew upon the posting of a reasonable bond or other financial security, the question of release from detention may be submitted to any court or tribunal agreed upon by the parties or, failing such agreement within 10 days from the time of detention, to a court or tribunal accepted by the detaining State under article 287 or to the International Tribunal for the Law of the Sea, unless the parties otherwise agree."

Sesuai dengan ketentuan tersebut Federasi Rusia memasukan gugatan (permohonan) terhadap Australia ke ITLOS yang meminta

pelepasan kapal Volga dan tiga awaknya pada tanggal 2 Desember 2002.¹⁴

Dalam permohonan dari Federasi Rusia dan dalam Pernyataan Tanggapan dari Australia, pihak-pihak mengajukan hal-hal sebagai berikut:¹⁵

a. Atas nama Federasi Rusia: Memohon kepada ITLOS ("Mahkamah") untuk menyatakan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Mahkamah mempunyai yurisdiksi sesuai Pasal 292 UNCLOS 1982 untuk memeriksa permohonan;
2. Menyatakan bahwa permohonan dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa responden (tergugat) melanggar Pasal 73(2) UNCLOS dalam hal responden menetapkan persyaratan pelepasan kapal Volga dan tiga awaknya adalah tidak dapat dibenarkan;
4. Memutuskan bahwa responden melepaskan Volga dan nakhoda serta awaknya, jika suatu jaminan atau keamanan yang dibebankan kepada pemilik dalam suatu jumlah yang tidak melebihi AU\$ 500,000 atau dalam jumlah serupa yang lain dalam semua keadaan yang patut menurut pertimbangan Mahkamah;
5. Memutuskan bentuk jaminan atau keamanan seperti dimaksud angka 4 (d); dan

¹⁴ *Contentious Cases, Judgment*. Alinea 1.

¹⁵ Alinea 28 dari *Contentious Cases, Judgment*. Lihat juga dalam *Application Submitted of the Russian Federation, The Volga-Application For Release of Vessel and Crew, Chapter 1: Introduction*, Alinea 1, Chapter 5:

6. Memutuskan bahwa responden (tergugat) membayar biaya kepada pemohon (penggugat) berkenaan dengan permohonan.

b. Atas nama Australia, dalam Pernyataan Tanggapan:¹⁶

Australia meminta agar Mahkamah membuat keputusan sebagaimana diminta dalam Memorial Rusia. Termohon meminta Mahkamah untuk memutuskan:

1. bahwa besar dan persyaratan yang ditetapkan oleh Australia untuk melepaskan kapal Volga dan awaknya adalah patut/layak (*reasonable*); dan
2. bahwa masing-masing pihak memikul biaya pengadilan sendiri-sendiri.

Pemeriksaan di muka Mahkamah diadakan pada 12-13 Desember, dan tanggal 23 Desember 2003, ITLOS menyampaikan keputusannya, berkaitan dengan kelayakan uang jaminan atau keamanan lainnya sebagai berikut:¹⁷

1. Dengan 19 : 2 suara, memutuskan bahwa Australia harus segera melepaskan Volga setelah ada uang jaminan atau jaminan lainnya lain yang akan ditentukan oleh Mahkamah;

¹⁶ *Statement in Reponse of Australia*, 7 Desember 2002. *Chapter 1: Introduction*, Alinea 1 dan *Chapter 7: Orders*, alinea 1. Dalam <http://www.itlos.org>. 26 Juni 2016 17:14 WIB

¹⁷ *The "Volga" Case (Russian Federation v. Australia), Prompt Release, Judgment*, Alinea 95. Dalam www.itlos.org/index.php?id=103. Diakses tanggal 26 Juni 2016 19:30 WIB. Keputusan Mahkamah (ITLOS) ini ada tujuh point. Disini hanya ditampilkan keputusan dalam angka 4-6

2. Dengan 19 : 2 suara, menentukan bahwa uang jaminan atau keamanan lainnya sejumlah AU\$ 1.920.000, harus disimpan (diposting) kepada Australia; dan

3. Suara bulat, menentukan bahwa uang jaminan harus dalam bentuk bank garansi dari bank yang ada di Australia atau memiliki perjanjian dengan bank Australia atau dalam bentuk lain, jika disepakati oleh para pihak.

2. Pengkajian Tindakan IUU Fishing yang Dilakukan Kapal Volga di Wilayah ZEE Australia

Penangkapan Kapal Volga dikarenakan adanya dugaan aktivitas penangkapan ikan yang dilakukannya di *Australian Fishing Zone* di *Heard and McDonald Islands*.

Kapal Volga ditahan oleh HMAS Canberra karena keadaan kapal saat itu sama seperti keadaan kapal yang baru saja menangkap ikan. Menurut penuturan salah satu petugas yang tergabung dalam *Australian Fisheries Officer*, terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ada aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal Volga. Terdapat 120 ton ikan Patagonian Toothfish di kapal. Setelah melakukan pengeledahan di kapal Volga, mereka menemukan beberapa bukti bahwa kapal itu baru saja melakukan kegiatan penangkapan ikan seperti, *conveyor belt* berjalan dari tempat pengolahan ikan di kapal sampai ke buritan kapal. *Conveyor belt* tersebut didapati dalam keadaan basah dan dipenuhi dengan sisik-

sisik ikan kecil. Di daerah buritan kapal juga ditemukan usus ikan dan sisik ikan yang masih terlihat basah dan segar.

Dalam pengeledahan tersebut juga ditemukan bukti-bukti seperti adanya sejumlah kail pancing di dek tepatnya di dekat daerah conveyor belt berada, disitu juga petugas menemukan beberapa ikan mirip *Scaly Mackerel* di dek dan dalam keadaan yang segar juga. Ditemukan juga adanya sebuah jala ikan yang sangat besar dan didalamnya ada banyak spons yang saat diperas petugas mengandung air yang banyak, diduga spons tersebut digunakan untuk membuat jala ikan itu segera kering. Petugas menemukan plastik cokelat yang digunakan untuk menyiapkan kail dan umpan. Memang tidak ditemukan adanya umpan penangkap ikan yang siap untuk digunakan namun terdapat banyak sisik ikan kecil di tempat penyimpanan tersebut.

Petugas yang telah selesai melakukan pemeriksaan di sekitar kapal, melakukan pemeriksaan ke tempat pengolahan ikan yang terdapat dalam perut kapal. Dalam pencarian tersebut petugas mencoba mencari bukti yang lebih kuat lagi, awalnya petugas menemukan cukup banyak kail dan tali pancing di dalam plastik cokelat yang berada disana. Petugas melanjutkan pemeriksaannya dan menemukan dua ekor Patagonian Toothfish di dalam sebuah kadang dari kawat, di salah satu ikan masih terdapat sebuah kail yang masih tersangkut di mulut ikan.

Petugas memeriksa kesegaran ikan tersebut, saat diperiksa salah satu ikan masih terlihat sangat segar

karena terdapat darah yang mengalir dan insangnya masih berwarna merah, sedangkan pada ikan lainnya memang sudah tidak mengeluarkan darah ataupun cairan lain namun insang ikan tersebut masih berwarna merah muda.

Setelah melihat keadaan kapal tersebut, petugas membawa kapal beserta awak dan isinya ke daerah Fremantle di barat Australia untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Melalui beberapa pemeriksaan, pihak berwenang memutuskan melakukan penyitaan terhadap kapal Volga yang diberitahukan kepada nahkoda kapal pada tanggal 20 Februari 2002.

Penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal Volga merupakan tindakan *illegal fishing*, dalam IPOA IUU dijelaskan bahwa *illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu.¹⁸

Kapal Volga menangkap ikan di wilayah ZEE Australia tanpa izin Australia, Australia dan Rusia tidak memiliki perjanjian tentang penangkapan ikan sebelumnya, maka dari itu tindakan penangkapan ikan tersebut merupakan *illegal fishing*.

Kapal Volga juga memasuki daerah *Australian Fishing Zone* dan

melanggar ketentuan perikanan yang berlaku di Australia yaitu *Fisheries Management Act* yang membuat kapal beserta awaknya harus ditahan pihak yang berwenang.

Pada saat ditangkap kapal Volga berada di *Australian Fishing Zone* dan ditahan berdasarkan ketentuan yang ada di dalam *Fisheries Management Act 1991*.

Pada 27 Februari 2002 dibuat laporan penilaian, yang disiapkan untuk tujuan jaminan bahwa Volga bernilai US\$ 1 juta, dan bahan bakar, pelumas serta peralatan bernilai AU\$ 147,460. Pada waktu ditangkap di atas Volga ditemukan hasil tangkapan sebanyak 131.422 ton ikan *patagonian toothfish* (*dissostichus eleginoides*) dan 21.494 ton umpan yang dilelang pada tanggal 20 Mei 2002 senilai AU\$ 1,932,579.28.¹⁹

Setelah itu, tiga anggota awak kapal (*the chief mate, the fishing master and the fishing pilot*), semua berkewarganegaraan Spanyol, dituntut telah menggunakan kapal ikan asing di Zona Perikanan Australia (AFZ) untuk tujuan komersial tanpa surat izin bagi kapal asing. Ketiganya, menerima untuk membayar uang jaminan masing-masing sejumlah AU\$ 75,000 tunai, menyerahkan semua paspor dan *seaman's papers*, dan tinggal di tempat yang ditetapkan oleh *the Supervising Fisheries Officer with the Australian Fisheries Management Authority* (AFMA). Pemilik Volga mendepositkan pembayaran sejumlah AU\$ 225,000 di pengadilan bagi ketiga anggota

¹⁸ Section II International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, Food And Agriculture Organization of The United Nations, Rome, 2001.

¹⁹ Usmawadi Amir, Op. Cit., Hlm 78.

awak pada atau sekitar 23 Maret 2002.

Penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal Volga juga dianggap sebagai tindakan *Unreported Fishing* karena tidak melaporkan penangkapannya kepada Australia, sesuai dengan pengertian *Unreported Fishing* menurut IPOA-IUU yaitu kegiatan penangkapan ikan baik tidak dilaporkan maupun dilaporkan secara salah kepada pihak yang berwenang atau bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.²⁰

B. Penyelesaian Sengketa IUU Fishing yang Dilakukan antara Rusia dan Australia melalui Pembayaran Uang Jaminan

UNCLOS 1982 tidak mengatur mengenai penjatuhan sanksi berupa penyitaan atau pemusnahan kapal asing, serta tidak memberikan hak kepada negara pantai untuk menjatuhkan sanksi berupa penyitaan atau pemusnahan kapal asing yang melakukan pelanggaran di wilayah ZEE nya. Pasal 105 UNCLOS hanya mengatur mengenai kewajiban negara-negara peserta untuk melakukan penyitaan terhadap kapal-kapal yang diduga sebagai kapal bajakan (*pirate ship*). Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi berupa penyitaan atau pemusnahan kapal asing dapat ditemukan di dalam ketentuan nasional negara-negara pantai.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982:

“The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention.”

Dari Pasal tersebut dapat bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan penangkapan atau penahanan terhadap kapal asing demi menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Tindakan penangkapan atau penahanan kapal asing oleh Negara Pantai tersebut harus dilanjutkan dengan pemberitahuan kepada negara pemilik kapal (*flag state*) sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (4). Diatur lebih lanjut dalam Pasal 73 ayat (2), kapal-kapal asing yang ditangkap beserta awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak (*reasonable bond*) atau bentuk jaminan lainnya (*other security*).

Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 73 UNCLOS 1982, jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di wilayah Zona Ekonomi (ZEE), negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan atas kapal tersebut dan memberitahu negara bendera kapal. Kapal dan

²⁰ Section II International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, Food And Agriculture Organization of The United Nations, Rome, 2001.

awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan *reasonable bond* (uang jaminan yang layak) yang diberikan kepada negara pantai.²¹

Ketentuan Pasal 73 (2) mewajibkan negara pantai untuk segera melepaskan kapal yang ditangkap dan awaknya setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya, sedangkan mengenai prosedur pelepasan segera diatur dalam Pasal 292. Meskipun Pasal 292 ayat (1) mensyaratkan bahwa uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya harus “masuk akal/layak (*reasonable*)”, namun UNCLOS 1982 justru tidak memberikan rincian tentang jaminan keuangan tersebut.²²

Hal penting yang perlu diketahui terkait jaminan keuangan untuk pelepasan segera penahanan terhadap kapal asing adalah kapan Pengadilan Negara Pantai harus mengumumkan jumlah uang jaminan. UNCLOS 1982 juga tidak mengatur mengenai kapan pengadilan negara pantai harus mengumumkan jumlah uang jaminan tersebut.

Dalam “*Volga*” *Case*, penetapan jumlah uang jaminan bagi pelepasan awak kapal ditetapkan melalui Pengadilan Negara Australia berdasarkan ketentuan *Fisheries Management Act* 1991.²³ Penentuan uang jaminan bagi pelepasan kapal *Volga* tersebut dilakukan oleh

Australian Fisheries Management Authority (AFMA).²⁴ Mengenai kapan Pengadilan Negara Pantai harus mengumumkan besarnya jumlah uang jaminan, tidak diatur secara khusus oleh hukum Internasional, namun pada praktiknya dalam “*Volga*” *Case*, Pengadilan Negara Pantai harus mengumumkan jumlah uang jaminan pelepasan suatu kapal asing yang ditahan oleh Negara Pantai bersangkutan, pada saat pemilik kapal mengajukan permohonan pelepasan terhadap kapal miliknya.²⁵

Berdasarkan Pasal 73 ayat (2) jo Pasal 292 ayat (1), pemberian uang jaminan atau jaminan lainnya yang merupakan syarat dilepaskannya (*prompt release*) suatu kapal asing yang ditahan oleh negara pantai, namun UNCLOS 1982 tidak mengatur lebih lanjut mengenai rincian besarnya uang jaminan atau jaminan lainnya pelepasan segera kapal asing yang ditahan oleh Negara Pantai, sehingga mengenai bagaimana menentukan besarnya uang jaminan yang layak, dapat melihat langsung pada praktiknya dalam kasus-kasus yang telah diputus oleh *International Tribunal For the Law of the Sea* (ITLOS) yang dapat dianggap sebagai salah satu sumber hukum internasional dalam hukum laut internasional.

Pengaturan pada Pasal 292 ayat (1) UNCLOS 1982, ITLOS dapat dikembangkan yurisprudensi yang logis mengenai permasalahan *prompt release*, khususnya dalam hal menentukan faktor yang relevan

²¹ Usmawadi Amir, Op. Cit, hal. 76.

²² *Ibid.*, Hlm 77.

²³ *Statement in Response of Australia*, Alinea 61-73, (*The “Volga” Case (Russian Federation v. Australia), Prompt Release*)

²⁴ *Ibid.*, Alinea 68.

²⁵ Usmawadi Amir, Op. Cit. Hlm 71.

untuk berkaitan dengan jaminan uang dan jaminan finansial lainnya. Faktor-faktor tersebut sebagaimana disebutkan dalam oleh Turk dalam buku “*The Work of the International Tribunal for the Law of the Sea*”, adalah:²⁶

1. *The gravity of the alleged offences. (bobot dari bukti yang didugakan)*
2. *The penalty imposed or imposible under the laws of the detaining State.(hukuman yang dijatuhkan menurut negara yang menahan)*
3. *The value of the detained vessel.(nilai dari kapal yang ditahan)*
4. *The value of the cargo seized.(nilai dari muatan yang ditahan)*
5. *The amount of the bond imposed by detaining state. (jumlah dari uang jaminan yang ditentukan oleh negara yang menahan)*

Kasus yang cukup terkenal adalah “Volga” Case, sengketa antara Russia dan Australia yang timbul akibat ditahannya kapal ikan Volga berbendera Russia oleh Australia. Adapun uang jaminan yang ditetapkan oleh Australian Fisheries Management Authority (AFMA) adalah sebesar AU\$ 3,332,500 yang terdiri dari:²⁷

1. Jaminan mencakup nilai kapal, bahan bakar, pelumas dan peralatan penangkap ikan (AU\$ 1,920,000);
2. Sejumlah (AU\$ 412.500) untuk mengamankan pembayaran denda potensial dikenakan dalam proses pidana yang masih tertunda terhadap anggota awak; dan
3. Jaminan (*a security*) (AU\$ 1.000.000) terkait dengan pelaksanaan operasional sistem pemantau kapal (VMS) dan tindakan pentaatan upaya konservasi oleh CCAMLR.

Adapun pandangan *International Tribunal For the Law of the Sea* (ITLOS) terkait besarnya uang jaminan yang ditetapkan oleh AFMA tersebut adalah:

1. Jaminan sejumlah AU\$ 1,920,000 yang diminta untuk melepaskan kapal, yang mencerminkan nilai kapal, bahan bakar, pelumas dan peralatan penangkap ikan serta tidak disengketakan para pihak, adalah layak (*reasonable*) dalam pengertian Pasal 292 UNCLOS 1982.²⁸
2. Jaminan sejumlah (AU\$ 412.500) untuk mengamankan pembayaran denda potensial dikenakan dalam proses pidana yang masih tertunda terhadap anggota awak, tidaklah *reasonable*. Karena setelah

²⁶ H. Turk, “*The Work of the International Tribunal for the Law of the Sea*”, Ocean Yearbook, vol 26 (2012), hal. 181 dan 192.

²⁷ *The Volga Case (Russian Federation v Australia) Prompt Release (Written proceedings), Statement in Reponse of*

Australia, 7 Desember 2002. Alinea 72.

²⁸Usmawadi Amir, Op. Cit, Hlm 81.

kepergian awak kapal dari Australia, menetapkan jaminan bagi mereka tidaklah disajikan untuk tujuan praktis.²⁹

3. Jaminan (*a security*) (AU\$ 1.000.000) terkait dengan pelaksanaan operasional sistem pemantau kapal (VMS) dan tindakan pentaatan upaya konservasi oleh CCAMLR, juga tidaklah *reasonable*.

Ketentuan dalam UNCLOS 1982 mengenai *prompt release* sebagaimana diatur dalam 292, Pasal 220 (7), dan Pasal 226 (1b), menggunakan istilah "uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya" dan "penjaminan atau keamanan finansial yang tepat lainnya". Maka dalam konteks ini, istilah "uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya" dalam Pasal 73 (2) UNCLOS 1982, dalam pandangan ITLOS, harus pada suatu uang jaminan atau jaminan lain yang bersifat keuangan. Mengikuti pandangan tersebut bahwa persyaratan non-finansial tidak dapat dianggap komponen dari uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya untuk tujuan menerapkan Pasal 292 sehubungan dengan dugaan pelanggaran Pasal 73 (2).³⁰

Dapat dilihat dalam kasus ini bahwa ITLOS berpandangan bahwa jaminan untuk melepaskan Volga, bahan bakar, pelumas dan peralatan memancing harus dalam jumlah AU \$ 1.920.000.³¹ Pandangan ITLOS tentang kelayakan uang jaminan

sebesar nilai kapal, bahan bakar, pelumas dan peralatan penangkap ikan ini, tercermin dalam putusan ITLOS.³²

Australia juga memasukan biaya untuk konservasi lingkungan sesuai dengan apa yang telah diatur CCAMLR tentang penataan dan pemeliharaan wilayah laut, tindak IUU Fishing yang dilakukan kapal Volga berpotensi merusak stabilitas populasi sumber daya alam dan populasi biota yang ada dalam wilayah ZEE Australia tersebut. Alasan tersebutlah yang mendasari adanya tuntutan biaya untuk penataan dan konservasi lingkungan laut oleh Australia terhadap Rusia.

Dalam menetapkan kelayakan uang jaminan atau keamanan lainnya, hanya komponen pertama yang layak (*reasonable*) menurut ITLOS, yaitu jaminan yang nilainya sama dengan nilai kapal, bahan bakar, pelumas dan peralatan penangkap ikan. Sedangkan komponen kedua dan ketiga merupakan komponen yang tidak layak (*unreasonable*). Di lapangan, termasuk dalam kasus ini, ITLOS telah menemukan komponen-komponen yang tidak layak (*unreasonable*), meliputi:³³

- a. Nilai kapal yang ditahan telah dinilai (dievaluasi) terlalu tinggi oleh pengadilan Negara penahan, seperti dalam kasus "Camauco" dan "Monte Confuro";

³² *Supra* catatan No. 16.

³³ Jianjun GAO, *Reasonableness of the Bond under Article 292 of the LOS Convention: Practice of the ITLOS.*, dalam <http://chinesejil.oxfordjournals.org/content/7/1/115.full.pdf+html>. Diakses 19 September 2016.

²⁹ *Supra* catatan No.15, alinea 72.

³⁰ Usmawadi Amir, Op. Cit, Hlm.

83.

³¹ *Supra* catatan No.15, alinea 90.

b. Nilai kapal yang ditahan tidak boleh dimasukkan dalam perlindungan uang jaminan, seperti dalam kasus “Hoshimaru”;

c. Denda untuk nakhoda atau pemilik kapal yang ditahan telah dinilai terlalu tinggi, seperti dalam kasus “Monte Confurco” dan “Hoshimaru”;

d. Yang disebut jaminan berlaku baik (*good behaviour bond*) seperti dalam kasus Volga.

Jadi seperti terlihat dalam pertimbangan Mahkamah, maka komponen kedua dan ketiga merupakan komponen yang tidak layak (*unreasonable*) menurut pengertian pasal 73 (2). Hal ini dapat dimaklumi, menurut Oman and Bantz bahwa fungsi “jaminan” dalam konteks tertentu cukup menyeimbangkan antara hak untuk meminta pelepasan dengan hak untuk mengadili dan menghukum.³⁴

Keputusan ITLOS dalam kasus ini terbatas dengan “proses pelepasan segera” menurut Pasal 292, oleh karena itu ITLOS tidak dapat mempertimbangkan masalah umum dari *IUU Fishing*. Sehingga dalam kasus ini ITLOS seakan “mengabaikan” pendirian Australia atas komponen ketiga yang digambarkan sebagai “*good behaviour bond*”, yakni jaminan agar tindakan serupa tidak dilakukan pada masa yang akan datang. Australia menyatakan dalam tanggapannya bahwa penipisan stok *patagonian toothfish* di Samudera Bagian Selatan merupakan masalah yang serius dan keprihatinan internasional. ITLOS menanggapi hal ini ‘memahami keprihatinan internasional tentang

IUU Fishing dan menghargai tujuan di balik kebijakan yang diambil oleh negara-negara untuk menangani masalah ini.³⁵

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang berkaitan dengan pokok pembahasan serta sekaligus merupakan jawaban dari permasalahan yang penulis buat, yaitu:

1. Penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal Volga yang berbendera Rusia merupakan tindakan *IUU Fishing*. Penangkapan tersebut terbukti melakukan *IUU Fishing* karena tindakan tersebut dilakukan di *Australian Fishing Zone di Heard and McDonald Islands*. Penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal Volga merupakan tindakan *illegal fishing*, dalam IPOA IUU dijelaskan bahwa *illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu.

Kapal Volga juga memasuki daerah *Australian Fishing Zone* dan melanggar ketentuan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Usmawadi Amir, Op. Cit., Hlm 85.

perikanan yang berlaku di Australia yaitu *Fisheries Management Act* yang membuat kapal beserta awaknya harus ditahan pihak yang berwenang. Pada saat ditangkap kapal Volga berada di *Australian Fishing Zone* dan ditahan berdasarkan ketentuan yang ada di dalam *Fisheries Management Act 1991*. Penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal Volga juga dianggap sebagai tindakan *Unreported Fishing* karena tidak melaporkan penangkapannya kepada Australia.

2. Penahanan kapal yang dilakukan oleh Australia sudah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982.

Dari Pasal tersebut dapat bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan penangkapan atau penahanan terhadap kapal asing demi menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982.

Sesuai ketentuan dalam UNCLOS 1982 mengenai *prompt release* sebagaimana diatur dalam 292, Pasal 220 (7), dan Pasal 226 (1b), menggunakan istilah "uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya" dan "penjaminan atau keamanan finansial yang tepat lainnya". Mengikuti pandangan tersebut bahwa persyaratan non-finansial tidak dapat dianggap komponen dari uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya untuk tujuan menerapkan Pasal 292 sehubungan dengan dugaan pelanggaran Pasal 73 (2).

B. Saran

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. IUU Fishing adalah salah satu ancaman pada keamanan maritim suatu negara. Berdasarkan Pasal 73 UNCLOS negara dapat melakukan penahanan atas kapal yang melakukan tindakan IUU Fishing di wilayah ZEE karena negara pantai memiliki hak berdaulat dan mengamankan wilayah negaranya. Indonesia dapat mengamankan wilayah ZEE dengan hak berdaulatnya atas wilayah tersebut dan melakukan penahanan, meskipun selanjutnya kapal tersebut harus segera dilepaskan namun Indonesia dapat meminta uang jaminan yang bisa mengganti kerugian atas potensi tangkapan ikan yang diambil pelaku IUU Fishing di wilayah ZEE Indonesia. Indonesia dapat juga mempertahankan hubungan baik dengan negara lain dengan melakukan penahanan dan pelepasan segera dibanding dengan memusnahkan kapal-kapal tersebut.

2. UNCLOS memang tidak secara eksplisit mengatur bagaimana penentuan jumlah uang jaminan tersebut, namun ITLOS atau negara yang berhadapan sengketa ini dapat menggunakan faktor-faktor yang relevan untuk berkaitan dengan jaminan uang dan jaminan finansial lainnya.

Faktor-faktor tersebut sebagaimana disebutkan dalam oleh Turk dalam buku "The Work of the International Tribunal for the Law of the Sea".

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Muhammad, Simela Victor, *Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia: Ancaman Terhadap Integritas Teritorial*, (Jakarta: Tiga Putra Utama, 2004)
- Pathiana, I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 1990)
- Shaw, Malcolm N, 2008, *Hukum Internasional*, Edisi Keenam, Diterjemahkan Oleh: Derta Sri Widowatie, Imam Baehaqi, dan M. Khozim, Bandung: Nusa Media
- Sodik, Dikdik Mohammad, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: Refika Utama, 2013)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Soemitro, Roni Harnintjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Turk, H., *The Work of the International Tribunal for the Law of the Sea*, Ocean Yearbook Vol: 26, 2012
- Willa, Marnixon R. C., *Konsep Hukum Dalam Pengaturan Dan Pengelolaan Wilayah*

Perbatasan Antarnegara, (Bandung: PT Alumni, 2006)

- Jurnal dan Laporan Penelitian
Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008, *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) Di Indonesia*, Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta
- Usmawadi Amir, 2013, *Journal Opinio Juris PENEGAKAN HUKUM IUU FISHING MENURUT UNCLOS 1982 (STUDI KASUS: VOLGA CASE)*, Vol.12 Januari- April 2013, Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta
- Jianjun GAO, *Reasonableness of the Bond under Article 292 of the LOS Convention: Practice of the ITLOS.*, dalam Chinese Journal of International Law, Oxford Journals, 2008

Peraturan-Peraturan

- United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982
- International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IPOA-IUUF) 2001
- Australian Fisheries Management Act 1991
- The Volga Case (Russian Federation v Australia) Prompt Release (Written proceedings), Statement in Reponse of Australia



Application Submitted of the Russian Federation, The Volga-Application For Release of Vessel and Crew, Chapter 1: Introduction

The "Volga" Case (Russian Federation v. Australia), Prompt Release, Judgment

Internet

Abdul Rahman, Zona Maritim Menurut UNCLOS 1982, <http://abdulhunila13.blogspot.co.id/2015/04/zona-maritim-dibawah-kedaulatan-negara.html> diakses 26 Mei 2016 Pukul 03:51 WIB

Gloria Samantha, Perikanan Sebagai Pilar Ketahanan Pangan Dunia, <http://nationalgeographic.co.id/b erita/2013/11/perikanan-sebagai-pilar-ketahanan-pangan-dunia> diakses tanggal 13 Mei 2016 Pukul 15:36

Muliadi Rusmana, Yurisdiksi Negara dan Laut Lepas, <http://muliadirusmana.blogspot.co.id/2010/12/jurisdiksi-negara-states-jurisdiction.html> diakses pada 26 Mei 2016 Pukul 05:14 <http://www.itlos.org>.